



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

RENSTRA PERUBAHAN 2019-2023

"BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT"



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

"Berani Untuk Kaltim Berdaulat"

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda

Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925

Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 800/I.1- 4904/BKD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA PERUBAHAN)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALTIM
TAHUN 2019-2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan penyesuaian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka kepentingan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019-2023, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusunan RENSTRA Perubahan tahun 2019-2023 pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

c. bahwa pembentukan Tim Penyusunan RENSTRA Perubahan Tahun 2019-2023 pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : "Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif";

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, khususnya Bab IV tentang Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang yang terkait dengan reformasi birokrasi disebut bahwa “Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang-bidang lainnya;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang SOTK UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan RENSTRA Perubahan Tahun 2019-2023 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan surat keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Tim Penyusunan RENSTRA Perubahan Tahun 2019-2023 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran langsung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021-2023 pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal, 14 Januari 2022



KEPALA,

Drs. Diddy Rusdiansyah Anan Dani, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196406271990031006

Lampiran : Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor: 800/I.1-4904/BKD
Tanggal: 14 Januari 2022

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
(RENSTRA PERUBAHAN) TAHUN 2019 - 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris : Kasubbag. Perencanaan Program
Anggota : 1. Kepala Bidang Mutasi ASN
2. Kepala Bidang Pengembangan ASN
3. Kepala Bidang Pembinaan ASN
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Informasi ASN
5. Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
6. Kasubbag/Kasubbid Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
8. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
9. Pengolah Data Program



KEPALA,

Drs. Diddy Rusdiansyah Anan Dani, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196406271990031006

Kata Pengantar

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sesuai dengan masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil Renstra BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan Perubahan Renstra yang didasari adanya perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Perubahan Renstra BKD Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen/instrumen perencanaan strategis yang mendukung program dan kegiatan kepegawaian sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 serta penyesuaian adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi BKD Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya (Renja) Badan Kepegawaian Daerah setiap tahun serta penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah hingga akhir periode 2023.

Segala kritik, saran dan masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan Renstra Badan Kepegawaian Daerah periode 2019-2023 ini ke depan.

Samarinda, 14 Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Drs. Diddy Rusdiansyah Anan Dani, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II Gambaran Pelayanan BKD Prov. Kaltim	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim	10
2.2 Sumber Daya BKD Prov. Kaltim	19
2.3 Kinerja Pelayanan BKD	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	33
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Startegis BKD	34
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Kab/Kota	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV Tujuan dan Sasaran	53
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD	53
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	55
5.1 Strategi dan Kebijakan	55
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	60
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	81
BAB VIII Penutup	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat 4 (empat) tahapan Perencanaan meliputi :

- a) Penyusunan Rencana;
- b) Penetapan Rencana;
- c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana;
- d) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Dalam rangka tahapan Penyusunan Rencana inilah, setiap Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional, termasuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian secara otonom.

Secara umum, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah suatu upaya manajemen perencanaan untuk mengatasi masalah dan kendala yang belum tuntas tertangani, dan mengantisipasi masalah, tantangan dan peluang yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis ditingkat regional, nasional maupun global. Rencana Strategis disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun sebagai pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur dan penyempurnaan manajemen.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 – 2025, RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut, yaitu:

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam mewujudkan sumber daya aparatur daerah;
- 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk tercapainya pelaksanaan tugas dan misi tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan arah dan perannya dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diamanatkan didalam RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD 2019 – 2023.

Pencapaiannya yaitu melalui suatu strategi, kebijakan, program dan kegiatan, selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja)

tahunannya sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Memasuki tahun ketiga pelaksanaan renstra BKD Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan evaluasi terhadap hasil Renstra. Evaluasi terhadap hasil Renstra BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra. Perubahan Renstra juga didasari adanya perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Kebijakan untuk melakukan perubahan Renstra sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD Provinsi menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Renstra BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, adalah adanya perubahan kebijakan nasional diantaranya :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Substansi Renstra BKD Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi terkini , permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan program kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indikator kinerja serta indikator kinerja utama kepala BKD Prov.Kaltim & target kinerjanya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, khususnya BAB IV tentang Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang yang terkait dengan reformasi birokrasi disebut bahwa “Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang-bidang lainnya;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai acuan bagi seluruh komponen/aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD sehingga di harapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi serta penyesuaian adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- 1) Menetapkan kebijakan strategis jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat;
- 2) Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
- 3) Menentukan langkah dan strategi yang berorientasi pada masa depan yang lebih baik, adaptif terhadap perubahan lingkungan yang dinamis, peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin penggunaan sumber daya organisasi yang efektif dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Renstra BKD Prov. Kaltim.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BKD PROV. KALTIM

Bab ini mencakup Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim, Sumber Daya BKD Prov. Kaltim, Kinerja Pelayanan BKD Prov. Kaltim, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Prov. Kaltim.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKD PROV. KALTIM

Bab ini mencakup Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Prov. Kaltim, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Prov. Kaltim, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Prov. Kaltim.

Bab V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan BKD Prov. Kaltim dalam 5 tahun mendatang.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKD Prov. Kaltim dalam 5 Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BKD PROV. KALTIM

Peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, sebagaimana diamanatkan juga dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 78 Tahun 2019 bahwasanya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kepegawaian.

Pada masa pandemi Covid-19, birokrasi di tuntut untuk mengubah strategi dalam pelayanan publik agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Strategi ini diharapkan mampu diimplementasikan secara cepat agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat bisa saling menyesuaikan diri dengan perubahan substansi dalam proses pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya di bidang kepegawaian dalam membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses pelaksanaan dan pengembangan serta kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan menindaklanjuti hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan terus dipacu mengingat kualitas sumber daya manusia yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur.

Terorganisirnya basis data dan informasi kepegawaian merupakan salah

satu prioritas program ke depan, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses peningkatan kualitas aparatur daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan terus melakukan segala upaya untuk menjamin produk kepegawaian dan hasil kajian strategik tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Pemetaan Kepegawaian sesuai dengan kompetensi serta kualifikasinya dan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana serta Sumber Daya Aparatur yang memadai, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Proses yang dimulai dari tahap ke tahap, kompilasi data, analisis data sampai ke tahap pembuatan rencana, semuanya memerlukan Pemetaan Kepegawaian sebagai bahan kerja dan implementasi dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur keberadaan Pemetaan Kepegawaian ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan dalam melakukan proses peningkatan sumberdaya aparatur daerah yang memadai. Beberapa Pemetaan Kepegawaian yang telah dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat dijadikan sebagai data awal dalam menganalisa dan membuat rencana bagi para pengambilan keputusan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui program pembinaan dan pengembangan aparatur telah berhasil menjalankan pekerjaannya melalui evaluasi RPJMD Tahun 2013-2018 dengan estimasi capaian kinerja mencapai 96,05% serta dalam mendukung Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik melalui penjabaran program prioritas berdasarkan indikator kinerja yang terukur, efektif dan akuntabel. Akan tetapi, sampai saat ini masih ada kelemahan dalam menjalankan strategi dan kebijakan diarah kepegawaian dikarenakan beberapa faktor eksternal dan internal dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.

Dalam mendukung pembangunan ASN untuk mencapai ketahap birokrasi berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*), Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupaya menjalankan sistem merit dalam pelaksanaan program

strategisnya, mulai dari perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kapasitas, dan reformasi kesejahteraan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Inilah yang menjadi tantangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kedepan nantinya dan akan menjadi program prioritas dalam mendukung RPJMD dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

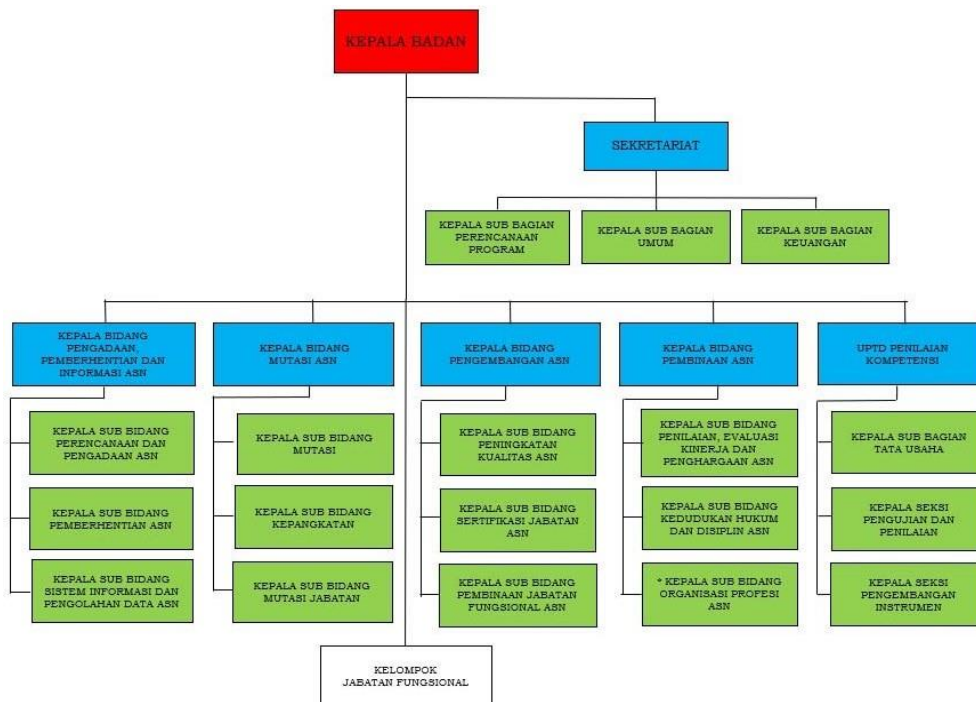
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada bagian ketiga pasal 6 poin d dinyatakan bahwa : "Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian".

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok, yaitu : "Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi "

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur



Sumber Data : Struktur Organisasi BKD Prov. Kaltim Tahun 2021

Adapun rincian/penjabaran Susunan Organisasi beserta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

a. Kepala Badan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN, Mutasi ASN, Pengembangan ASN serta Pembinaan ASN;
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pengadaan, Pemberhentian, Informasi ASN;
- 4) Pelaksanaan Kebijakan Teknis Mutasi ASN;
- 5) Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pengembangan ASN;

- 6) Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pembinaan ASN;
- 7) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN, Mutasi ASN, Pengembangan ASN dan Pembinaan ASN;
- 8) Pelaksanaan Administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Jumlah personil di Sekretariat sebanyak 32 orang (termasuk PNS dan tenaga kontrak).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengoordinasian, penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- 2) Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian, ketatalaksanaan,

perlengkapan dan pemeliharaan, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan kinerja ASN.

3) Sub Bagian Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran, pelaporan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, serta pengembangan teknis dalam pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN. Jumlah personil di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN sebanyak 14 orang (termasuk PNS dan tenaga kontrak).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan pengadaan ASN;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pemberhentian ASN;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang sistem informasi dan pengolahan data ASN;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan dan pengadaan ASN, pemberhentian ASN serta sistem informasi dan pengolahan data ASN;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya;

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis,

pengaturan teknis, fasilitasi, pengendalian dan pelaporan dalam perencanaan dan pengadaan ASN.

- 2) Sub Bidang Pemberhentian ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pengaturan teknis, fasilitasi dan pengendalian dan pelaporan dalam proses pemberhentian ASN.
- 3) Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengaturan teknis, fasilitasi, evaluasi dan pengembangan terhadap sistem informasi dan pengolahan data ASN.

d. Bidang Mutasi ASN

Bidang Mutasi ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dalam pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan Mutasi ASN. Jumlah personil di Bidang Mutasi ASN sebanyak 10 PNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang mutasi ASN;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang mutasi ASN;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang mutasi jabatan pelaksana;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sub bidang kepegangatan ASN;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang mutasi jabatan structural;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mutasi jabatan pelaksana, kepegangatan dan mutasi jabatan structural;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Mutasi ASN terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, analisi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan mutase jabatan pelaksana.

- 2) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan mengenai kepangkatan.
 - 3) Sub Bidang Mutasi Jabatan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan mutase jabatan structural.
- e. Bidang Pengembangan ASN
- Bidang Pengembangan ASN mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian teknis dalam pengembangan ASN. Jumlah personil di Bidang Pengembangan sebanyak 10 PNS.
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan ASN menyelenggarakan fungsi :
- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan ASN;
 - 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pengembangan ASN;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Peningkatan Kualitas ASN;
 - 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Sertifikasi Jabatan ASN;
 - 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pembinaan jabatan fungsional ASN;
 - 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas ASN, sertifikasi jabatan ASN serta pembinaan jabatan fungsional ASN;
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bidang Pengembangan ASN terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan

teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas ASN.

- 2) Sub Bidang Sertifikasi Jabatan ASN, mempunyai tugas Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan dalam sertifikasi jabatan ASN.
- 3) Sub Bidang Jabatan Fungsional ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap pembinaan jabatan fungsional bagi ASN.

f. Bidang Pembinaan ASN

Bidang Pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dalam pembinaan ASN. Jumlah personil di Bidang Pembinaan sebanyak 22 orang (termasuk PNS dan Non PNS).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan ASN;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pembinaan ASN;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Penilaian, Evaluasi Kinerja, dan Penghargaan ASN;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Subbidang Organisasi Profesi ASN;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian, evaluasi kinerja, dan penghargaan ASN, kedudukan hukum dan disiplin ASN serta organisasi profesi ASN;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pembinaan ASN terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasillitasi dan pelaporan terhadap kedudukan hukum dan disiplin ASN.
- 2) Sub Bidang Penilaian, Evaluasi Kinerja, dan Penghargaan ASN, mempunyai tugas Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan terhadap penilaian, evaluasi kinerja dan penghargaan bagi ASN.
- 3) Sub Bidang Organisasi Profesi ASN, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, fasilitasi dan pelaporan organisasi profesi bagi ASN.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penilaian Kompetensi Pegawai

UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Badan Kepegawaian Daerah dibidang Penilaian Kompetensi Pegawai dan melaksanakan urusan ketatausahaan. Jumlah personil di UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sebanyak 15 orang (termasuk PNS dan tenaga kontrak).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang perencanaan, evaluasi, dan penilaian kompetensi pegawai;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Seksi Pengujian dan Penilaian, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan pengujian dan penilaian kompetensi pegawai.
 - c. Seksi Pengembangan Instrumen, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengembangan instrument kompetensi pegawai.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- Merupakan sekelompok jabatan yang berisikan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai personil sebanyak 16 PNS dan terdiri dari 3 rumpun jabatan, yaitu Analis Kepegawaian, Pranata Komputer, dan Assessor.

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional serta untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tata kerja sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;

4. Setiap laporan yang di isikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
5. Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
6. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

2.2 Sumber Daya BKD Prov. Kaltim

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 1 Maret 2021 mempunyai personil sebanyak 102 orang terdiri dari 25 pejabat struktural, 15 orang pejabat fungsional, 29 orang pejabat pelaksana, dan 33 orang tenaga kontrak.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2019, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai BKD Prov. Kaltim
Berdasarkan Jabatan & Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jabatan	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	JPT Pratama	1	0	1
2	Administrator	3	3	6
3	Pengawas	8	10	18
4	Fungsional	5	10	15
5	Pelaksana	16	13	29
6	Tenaga Kontrak	27	6	33
JUMLAH TOTAL		60	42	102

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur per Maret 2021

Tabel 2.3
Rekapitulasi PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH	Keterangan
1	Strata 2	9	1. Manajemen Keuangan = 1 2. Ilmu Adm. Negara = 5 3. Ilmu Adm. Publik = 1 4. Ekonomi Umum = 1 5. Psikologi Industri Organisasi = 1
2	Strata 1/ Diploma IV	38	1. Ilmu Jurnalistik = 1 2. Psikologi Umum = 5 3. Ekonomi Keuangan = 1 4. Ekonomi Manajemen = 1 5. Ekonomi Akuntansi = 2 6. Ilmu Adm. Negara = 5 7. Teknik Informatika = 1 8. Ilmu Komputer = 1 9. Sistem Informasi = 1 10. Manajemen Pembangunan = 3 11. Politik Pemerintahan = 7 12. Manajemen Pemerintahan = 2 13. Ilmu Administrasi = 1 14. Ilmu Hukum = 1 15. Manajemen Informasi Komunikasi = 1 16. Keuangan Daerah = 5
3	Diploma III	8	1. Ilmu Adm. Negara = 2 2. Adm Keuangan Daerah = 1 3. Teknik Informasi = 1 4. Teknologi Informasi = 2 5. Bahasa Inggris = 1
4	SLTA	6	
	JUMLAH	61	

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai *Center of Knowledge* dan *Learning Organization*. Komposisi jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan mampu memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai dilingkungan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 60 orang laki – laki (58,82%) dan perempuan sebanyak 42 orang (41,18%) , yang berarti jumlah pegawai dilingkungan BKD Prov. Kaltim hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berikut kami sajikan rekapitulasi pegawai BKD Prov. Kaltim per Unit Kerja berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pegawai BKD Provinsi Kalimantan Timur Per Unit Kerja
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kepala BKD	1	0	1
2	Sekretariat	8	7	15
3	Bidang Mutasi ASN	3	7	10
4	Bidang Pengembangan ASN	6	3	9
5	Bidang Pembinaan ASN	1	8	9
6	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	5	5	10
JUMLAH TOTAL		23	31	54

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat golongan yaitu :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) BKD Prov. Kaltim
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN														
			IV					III					II				
			A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	SEKRETARIAT	10	-	1	-	-	1	2	3	1	3	9	-	-	-	-	0
3.	BIDANG MUTASI ASN	7	1	-	-	-	1	1	-	3	2	6	-	-	-	-	0
4.	BIDANG PENGEMBANGAN ASN	12	1	1	-	-	2	1	3	1	3	8	-	-	1	1	2
5.	BIDANG PEMBINAAN ASN	13	1	1	-	-	2	3	3	1	2	9	-	-	1	1	2
6.	BIDANG PENGADAAN , PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN	9	-	1	-	-	1	1	2	2	1	6	-	-	1	2	3
7.	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI	9	1	-	-	-	1	3	2	2	1	8	-	-	-	-	0
JUMLAH TOTAL		61	3	4	0	1	9	11	13	10	12	47	-	-	3	4	7

Sumber Data : BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah Kantor BKD Jl. M. Yamin	2.880	m ²
2	Tanah Assessment Center Jl. Kartini	2.513	m ²
3	Bangunan Gedung BKD Jln. M. Yamin	4.231	m ²
4	Bangunan Gedung Assessment Center	1.848	m ²
5	Jumlah Lantai Gedung BKD	5	Lantai
6	Jumlah Lantai Gedung Assessment Center	3	Lantai
7	Lantai 1 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Parkir	1	Area/Halaman
	• Ruang Kerja Bidang Dokinfo	1	Ruang
	• Toilet Lantai 1	2	Ruang
	• Ruang Pengairan	1	Ruang
	• Ruang Genset	1	Ruang
8	Lantai 2 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Rapat	2	Ruang
	• Ruang Kerja Sekretariat	2	Ruang
	• Ruang Kerja Kepala BKD	1	Ruang
	• Ruang Tata Naskah	1	Ruang
	• Ruang Perpustakaan	1	Ruang
	• Ruang PABX	2	Ruang
	• Ruang Pantry	1	Ruang
	• Ruang Kontrol	1	Ruang
	• Musholla	1	Ruang
	• Toilet Lantai 2	2	Ruang
9	Lantai 3 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Rapat	1	Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Pengembangan	1	Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Mutasi	1	Ruang
	• Ruang Pantry	1	Ruang
	• Toilet Lantai 3	2	Ruang
10	Lantai 4 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		

	• Ruang Kerja Bidang Dokinfo	2	Ruang
	• Ruang Kerja Bidang Pembinaan	9	Ruang
	• Ruang Kerja JFT	1	Ruang
	• Ruang Pantry	1	Ruang
	• Toilet Lantai 4	2	Ruang
11	Lantai 5 Gedung BKD M.Yamin terdiri dari :		
	• Ruang Makan	1	Ruang
	• Kantin	1	Ruang
	• Roof Top	1	Ruang
12	Lantai 1 Assessment Center terdiri dari :		
	• Ruang CAT	3	Ruang
	• Ruang Data/Monitor	1	Ruang
	• Ruang Sekretariat	1	Ruang
	• Ruang Perlengkapan	1	Ruang
	• Toilet Lantai 1	2	Ruang
13	Lantai 2 Assessment Center terdiri dari :		
	• Asrama Peserta Tes	18	Ruang
14	Lantai 3 Assessment Center terdiri dari :		
	• Ruang Monitor	1	Ruang
	• Ruang Simulasi Individu	5	Ruang
	• Ruang FGD	2	Ruang
	• Musholla	1	Ruang
	• Ruang Makan	1	Ruang
	• Dapur	1	Ruang
	• Toilet Lantai 3	2	Ruang
15	Genset	2	unit
16	Alat Bengkel dan Alat Ukur	17	Unit
17	Alat Pertanian	21	Unit
18	Alat Angkutan		
	a. Kendaraan Roda 4	9	unit
	b. Kendaraan Roda 2	4	unit
19	Peralatan Kantor dan rumah tangga	1.300	unit
20	Alat Studio dan Alat Komunikasi	135	unit
21	Alat Keamanan	65	unit
22	Komputer PC	101	unit
23	Laptop/Note Book	35	unit
24	Printer	69	unit
25	Alat Laboratorium	36	unit
26	Alat Kedokteran	8	unit
27	Buku Perpustakaan	213	buku

Sumber Data : Inventaris BKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020
Per 31 Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan BKD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menyikapi era globalisasi informasi, dan reformasi demokrasi, akan berpengaruh terhadap sikap kritis dan keterbukaan dari berbagai elemen masyarakat dalam keterlibatannya pada proses manajemen kepegawaian. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus mampu memberikan pelayanan informasi hasil-hasil perencanaan manajemen kepegawaian baik dalam bentuk publikasi maupun visual dan sebagai wujud nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Kalimantan Timur.

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Jenis Layanan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
1. Permohonan Pindah Instansi Antar Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim	Bidang Mutasi ASN
2. Permohonan Pindah Instansi Antar Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur	
3. Permohonan Pindah Instansi dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
4. Permohonan Pindah Instansi dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur ke Luar Provinsi Kalimantan Timur (ke Departemen; Kementerian/Lembaga; Provinsi lain; Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kalimantan Timur)	
5. Permohonan Pindah Instansi dari Luar Provinsi Kalimantan Timur Ke Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur	
6. Permohonan Pindah Instansi dari Luar Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
7. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim Golongan Ruang IV/a dan IV/b	
8. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim Golongan Ruang IV/c ke atas	
9. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kaltim Golongan I dan II	
10. Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kaltim Golongan Ruang IV/c ke atas	
11. Perbaikan lain-lain pada SK Kenaikan Pangkat	
12. Perbaikan Masa Kerja pada SK Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Kaltim	
13. Peninjauan Masa Kerja PNS Kabupaten/Kota se-Kaltim Golongan Ruang IV/a dan IV/b	

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
14. Peninjauan Masa Kerja PNS Provinsi Kaltim	
15. Penetapan Pengangkatan Jabatan Struktural Kabupaten/Kota (SK Gubernur)	
16. Penetapan Pengangkatan Jabatan Struktural Prov (SK Gubernur)	
17. Pengangkatan dalam Jabatan struktural secara Terbuka	
18. Penetapan Hasil Konsultasi Pengangkatan Es II/b (Gub)	
19. Penetapan Pemberhentian Jabatan Struktural	Bidang Pengembangan ASN
20. Penetapan Pembebasan Sementara-Pemberhentian-Penyediaan Jabatan Fungsional Tertentu (SK Kepala BKD; Sekretaris Daerah; Wakil Gubernur; Gubernur)	
21. Penetapan Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu (SK Kepala BKD; Sekretaris Daerah; Wakil Gubernur; Gubernur)	
22. Penetapan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Tertentu (SK Kepala BKD; Sekretaris Daerah; Wakil Gubernur; Gubernur)	
23. Penetapan PLT/PLH Struktural	
24. Penetapan Calon Peserta Diklat Teknis Fungsional bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim	
25. Penetapan Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; II; III dan IV.	
26. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah	
27. Penetapan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; II; III; dan IV	
28. Assesmen Center/Fit And Proper Test / Tes Psikologi Bagi PNS Dilingkungan Pemprov. Kaltim	
29. Penetapan Calon Bimbingan Teknis bagi PNS dilingkungan Pemprov. Kaltim	
30. Penetapan Calon Peserta Diklat Prajabatan bagi PNS dilingkungan Pemprov. Kaltim	
31. Penetapan Pemberian Cuti Besar Pegawai	Bidang Pembinaan ASN
32. Penetapan Pemberian Cuti Sakit Pegawai	
33. Pemberhentian Sementara dan Tetap karena Tindak Pidana	
34. Penetapan Hukuman Pelanggaran Disiplin PNS	
35. Penetapan Keputusan Perceraian PNS	
36. Pelaksanaan Medical Check Up	
37. Pemroses Usulan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	
38. Pemroses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP.3) untuk Esselon II	
39. Pemrosesan Gaji Berkala	
40. Pemrosesan Konseling	
41. Pemrosesan Usulan Satyalancana Karya Satya	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
42. Penetapan Peserta Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil	
43. Pembuatan SK Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Golongan I; II dan III	
44. Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah	

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
45. Penyusunan Rincian Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah	Informasi ASN
46. Pengambilan Sumpah Janji PNS	
47. Pemrosesan Usulan Kartu Taspen	
48. Implementasi Biometrik KPE	
49. Pengelolaan Tata Naskah Khusus Pejabat Eselon II (baru)	
50. Pengelolaan Tata Naskah Berkas Pegawai Masuk	
51. Pengelolaan Tata Naskah Berkas Pegawai Pensiun	
52. Pengelolaan Tata Naskah Berkas Pegawai Mutasi	
53. Pengusulan Penetapan Karis	
54. Pengusulan Penetapan Karpeg	
55. Pengusulan Penetapan Karsu	
56. Penyusunan Brosur	
57. Penyusunan Buku profil	
58. Penyusunan Buku saku	
59. Pemeliharaan jaringan (LAN)	
60. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	
61. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	
62. Pemberian SK MPP (Masa Persiapan Pensiun)	
63. Penetapan SK Pensiun BUP bagi Gol. IV/b kebawah	
64. Penetapan SK Pensiun BUP bagi Gol. IV/c keatas	
65. Penetapan SK Pensiun Dini Kabupaten/Kota	
66. Pengelolaan Website BKD Prov Kaltim	
67. Penyusunan Penetapan Kinerja	Sekretariat
68. Penyusunan RKA	
69. Penyusunan RKPD	
70. Penyusunan DPA	
71. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	
72. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	
73. Penyusunan Renstra	
74. Penyusunan LAKIP	
75. Proses Pembayaran Pihak Ketiga atau LS	
76. Proses Penerbitan Ganti Uang (GU)	
77. Proses Penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) Triwulan	
78. Proses Penerbitan Tambahan Uang (TU)	
79. Proses Penerbitan Uang Persediaan (UP)	
80. Pelaporan Keuangan	
81. Pemberian Cuti Pegawai	
82. Pemrosesan Perjalanan Dinas Pegawai	
83. Pemrosesan SK Kenaikan Gaji Berkala Golongan IIIId ke bawah	
84. Pemrosesan Surat Masuk	

Jenis Layanan	Unit Kerja terkait
85. Pemrosesan Usul Administrasi Kepegawaian	
86. Penerima Tamu	
87. Pengadaan Belanja Modal	
88. Penyusunan Laporan Daftar Hadir Pegawai	

Kinerja Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi

Kinerja pelayanan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan 5 tahun terakhir, diuraikan berdasarkan tugas fungsi :

- Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- Pemberian dukungan atas Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kepegawaian Daerah;
- Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Mutasi Pegawai;
- Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pengembangan;
- Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Pembinaan;
- Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
- Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi yang telah dilakukan, maka pencapaian kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan diklat struktural di lingkungan Pemprov. Kaltim				PNS	1.189	699	80	40	155	954	907	80	40	54	80%	130%	100%	100%	35%
2	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas				PNS	4	4	350	1.000	114	3	1	348	971	256	75%	25%	99%	97%	225%
3	Jumlah Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional				PNS	510	400	-	380	150	317	173	-	395	72	62%	43%	0%	104%	48%
4	Jumlah Dokumen Penyusunan E-Formasi				Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Dokumen Usulan Kebutuhan Pegawai				Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS				SK	90	168	-	27	24	99	168	-	29	24	110%	100%	0%	107%	100%
	Jumlah Pengambilan Sumpah/Janji PNS				PNS	-	-	-	100	90	-	-	-	98		0%	0%	0%	98%	0%
7	Jumlah SK yang terbit terhadap usulan mutasi				SK	300	200	200	1.000	300	224	310	250	950	168	75%	155%	125%	95%	56%
8	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu				SK	2.700	2.000	2.000	1.800	1.300	2.785	2.127	1.522	1.889	1.543	103%	106%	76%	105%	119%
9	Jumlah Aplikasi kepegawaian yang dikembangkan				Aplikasi	-	-	6	3	3	-	-	6	3	3	0%	0%	100%	100%	100%
10	Jumlah data PNS yang terupdate dalam sistem SIMPEG dan SAPK				Data PNS	7.500	7.234	7.288	11.500	1.954	5.581	6.699	6.635	11.566	1.017	74%	93%	91%	101%	52%

Renstra Perubahan 2021 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	Jumlah PNS yang menerima penghargaan yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun				PNS	400	370	262	225	300	425	377	262	225	218	106%	102%	100%	100%	73%
12	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Eselon I				PNS	26	21	30	30	10	26	21	30	31	7	100%	100%	100%	103%	70%
13	Jumlah PNS yang mendapat ijin perceraian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.				PNS	-	10	-	-	12	-	16	-	-	16	0%	160%	0%	0%	133%
14	Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Ijin Belajar				PNS	115	140	62	32	120	144	206	62	32	45	125%	147%	100%	100%	38%
15	Jumlah Praja IPDN yang mendapatkan Biaya penunjang Pendidikan				Orang	38	125	-	-	-	38	122	-	-	-	100%	98%	0%	0%	0%
16	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan yang termonitoring dan terevaluasi				Laporan	12	8	12	1	-	12	8	12	1	-	100%	100%	100%	100%	0%
17	Jumlah peserta yang mengikuti konseling menjelang purna tugas				PNS	200	149	80	-	-	160	149	80	-	-	80%	100%	100%	0%	0%
18	Jumlah Peserta yang lulus dalam Ujian Dinas				PNS	51	60	-	173	-	51	59	-	173	-	100%	98%	0%	100%	0%
19	Jumlah rekomendasi permasalahan kepegawaian				Rekomendasi	-	-	-	29	10	-	-	-	29	7	0%	0%	0%	100%	70%
20	Jumlah Pegawai yg mengikuti Pengujian Kesehatan PNS				PNS	213	146	146	-	-	208	154	104	-	-	98%	105%	71%	0%	0%
21	Persentase Tingkat Kehadiran PNS				%	-	90	98	99	98	-	88	99	99	98	0%	98%	101%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	Jumlah pegawai yang mengambil masa cuti				PNS	100	100	100	300	200	172	122	121	258	84	172%	122%	121%	86%	42%
23	Jumlah Pegawai yang Pensiun				PNS	60	95	95	400	255	71	154	162	380	132	118%	162%	171%	95%	52%
24	Persentase PNS yang memiliki nilai diatas cukup				%	-	-	99	99	99	-	-	99	99	94	0%	0%	100%	100%	95%
25	Jumlah Pegawai yang terpetakan dan terukur kemampuannya				PNS	-	-	-	960	200	-	-	-	875	26	0%	0%	0%	91%	13%
26	Jumlah Peremajaan Data PNS				Data PNS	-	-	-	11.500	11.570	-	-	-	11.566	5.300	0%	0%	0%	101%	46%

- : Kegiatan belum terakomodir dalam DPA

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan pada level program; selanjutnya, akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode perencanaan sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung + ABT	56.476.982.000	30.242.000.000	22.744.921.000	12.144.538.000	13.486.200.000	47.753.777.300	27.372.433.372	21.442.886.985	11.868.015.996	10.696.895.306	85%	91%	94%	98%	79%	-0,39	-0,38
Belanja Tidak Langsung	6.995.002.747	7.563.223.397	8.462.453.259	8.613.017.000	9.498.763.000	6.625.587.431	6.700.543.977	7.024.632.033	6.945.471.855	7.650.073.029	95%	89%	83%	81%	81%	0,07	0,03
Total	63.471.984.747	37.805.223.397	31.207.374.259	20.757.555.000	22.984.963.000	54.379.364.731	34.072.977.349	28.467.519.018	18.813.487.851	18.346.968.335	86%	90%	91%	91%	80%	-0,28	-0,28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, untuk Tahun 2019-2023 ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut.

Munculnya berbagai kebijakan baru mengenai manajemen dan administrasi kepegawaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan Kepegawaian Negara; dan Kementerian Dalam Negeri, yang harus segera diimplementasikan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pandemi Covid-19 telah merubah seluruh tantangan masyarakat dunia. Salah satunya struktur social pada masyarakat. Mulai tata kelakuan (*mores*), kebiasaan (*folkways*), cara (*usage*), dan adat istiadat (*custom*) berubah dan beradaptasi.

Untuk periode 2019-2023, ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut.

1. Tersedianya UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
2. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi.
4. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKD

Pada Bab ini, akan dijelaskan permasalahan yang terjadi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD

Berdasarkan Isu Startegis dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, khususnya dalam menjalankan misi ke 5 yaitu Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan ditangani oleh BKD Prov. Kaltim selama 5 tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Isu Startegis
Dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim

Masalah Utama	Masalah	Akar Permasalahan
Implementasi transformasi birokrasi manajemen ASN yang belum berjalan secara maksimal	Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel	1. Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian 2. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN 3. Belum semua ASN memiliki standar kualifikasi sesuai dengan syarat jabatan 4. Belum optimalnya kinerja dan kualitas ASN terhadap pelayanan publik

Berdasarkan identifikasi permasalahan isu startegis diatas, permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah :

1. Belum Optimalnya Sistem Administrasi Kepegawaian
2. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN
3. Belum semua ASN memiliki kualifikasi sesuai dengan syarat jabatan
4. Belum optimalnya kinerja dan kualitas ASN terhadap pelayanan publik

Dalam hal ini berkaitan erat dengan kualitas kinerja aparatur serta optimalisasi sistem administrasi kepegawaian. Untuk mengetahui permasalahan pelayanan Badan Kpegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan BKD beserta Faktor yang mempengaruhi
BKD Prov. Kaltim

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BKD
	Internal	Eksternal	
(1)	(4)	(5)	(6)
Masih perlunya peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah			
- Belum Optimalnya sistem administrasi kepegawaian	- SDM - Mekanisme kerja - Sarana dan Prasarana	- Partisipasi Perangkat Daerah	Kualitas informasi kepegawaian perlu ditingkatkan
- Belum semua ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN	- SDM - Mekanisme dan Prosedur kerja - Kebijakan pimpinan	- Koordinasi dengan Instansi terkait	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi belum sepenuhnya mengakomodir peta kompetensi
- Belum semua ASN	- SDM	- Partisipasi	Penempatan dalam

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BKD
	Internal	Eksternal	
(1)	(4)	(5)	(6)
memiliki standar kualifikasi yang sesuai dengan syarat jabatan	- Mekanisme dan Prosedur kerja	perangkat daerah	jabatan belum sesuai kualifikasi
- Belum Optimalnya kinerja dan kualitas ASN dalam peningkatan pelayanan publik	- Mekanisme Kerja - Sarana dan Prasarana	- Kebijakan Pusat - Koordinasi perangkat daerah	Penerapan aplikasi pengukuran kinerja belum diimplementasikan
	- SDM - Sarana prasarana - Mekanisme kerja	- Partisipasi Perangkat Daerah	Penerapan standar kompetensi dan pola karier belum terimplementasi
	- Mekanisme dan Prosedur kerja	- Partisipasi perangkat daerah	Peningkatan profesionalisme aparatur belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih adalah sebagai berikut:

Visi: “BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT”.

Misi:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas;
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Misi ke-5 yaitu **“Berdaulat dalam Mewujudkan**

Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik”, yang bertujuan untuk Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik, dengan sasaran Meningkatnya Profesionalitas dan Integritas Aparatur Pemerintahan.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, dari misi tersebut, pada tabel 3.1 di bawah ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT"				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : Berdaulat dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik, dengan sasaran Meningkatkan Profesionalitas dan Integritas Aparatur Pemerintahan dengan indikator Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas Pegawai	1. Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian 2. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN 3. Belum semua ASN memiliki standar kualifikasi sesuai dengan syarat jabatan 4. Belum optimalnya kinerja dan kualitas ASN dalam meningkatkan pelayanan publik	1. Kinerja pelayanan kepegawaian belum optimal; 2. Belum terintegrasi database kepegawaian Provinsi Kaltim dengan sistem pusat dan Kab/Kota; 3. Belum terukurnya kinerja PNS secara efektif dan akuntabel; 4. Tidak seimbangnya kebutuhan PNS baru dengan yang pensiun; 5. Mekanisme seleksi PNS yang masuk ke Provinsi Kaltim yang belum mengedepankan kualifikasi dan formasi 6. Belum tersusunnya pola karier yang baik serta lemahnya kaderisasi pimpinan; 7. Penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data	1. Kemajuan teknologi informasi; 2. Tersedianya jaringan informasi data; 3. Tersedianya UPTD Penilaian Kinerja Pegawai; 4. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 6. Tersedianya institusi yang mendukung pengembangan pegawai; 7. Adanya komitmen Gubernur untuk pengembangan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan; 8. PP No. 41 tahun 2007 tentang organisasi pemerintah daerah; 9. PP. No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS; 10. PP. No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 11. Adanya Sarpras yang menunjang 12. Permenpan 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN

Visi: "BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT"				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dan informasi kepegawaian yang memadai. 8. Peta Jabatan yang di susun belum disesuaikan dengan Anjab dan ABK	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota

Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut.

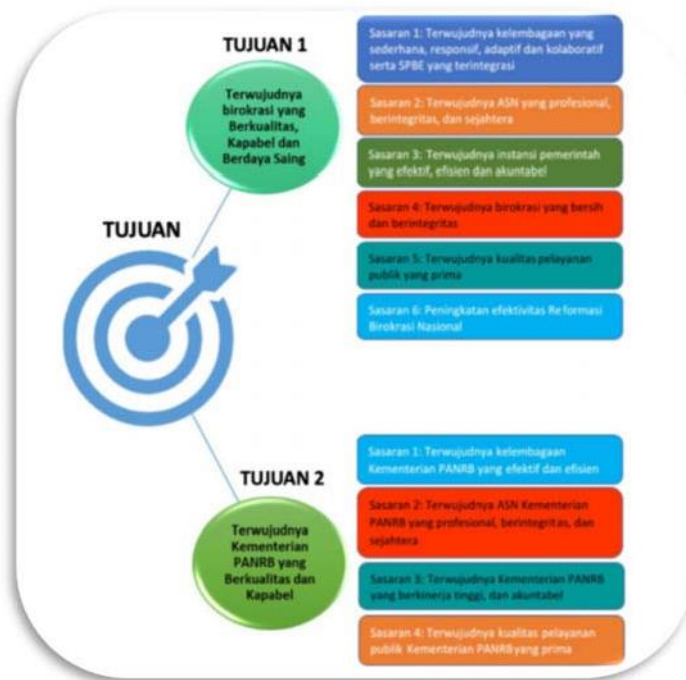
"Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong"

Misi:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Gambar 3.3.2

Tujuan dan Sasaran Strategi Kemenpan & RB



Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut.

“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi :

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, Kriteria manajemen ASN, dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN

Sasaran dari Badan Kepegawaian Negara dijabarkan dibawah ini:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN
2. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
3. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas
4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima
6. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN
7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa ”.

Misi :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Visi dan Misi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah sebagai berikut :
“ Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”

Misi :

1. Mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN;
2. Melaksanakan Tata Kelola KASN yang mandiri, professional dan akuntabel.

Apabila dikaitkan dengan visi misi Kementerian/Lembaga, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Visi dan Misi Kementerian/Lembaga terkait	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
Visi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”			
1	Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – digital bureaucracy	-SDM aparatur dan sapras pendukung yang belum bejalan secara optimal	Adanya Sistem dan regulasi yang mendukung jalannya birokrasi berbasis elektronik
2	Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global	Lemahnya perubahan mainset SDM Aparatur, lemahnya sistem yang ada, kebijakan yang tidak mendukung	Perbaikan sistem pengembangan kompetensi melalui diklat teknis, fungsional, dan struktural
3	- Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Inkonsistensi terhadap aturan yang ada, kebijakan yang tidak mendukung, SDM Aparatur yang kurang kompeten	Adanya sistem yang mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No	Visi dan Misi Kementerian/ Lembaga terkait	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi tidak didukung dengan sumber daya yang kompeten, kompetitif, dan profesional	Adanya regulasi yang mengatur pengelolaan reformasi birokrasi
Visi Badan Kepegawaian Negara : “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”			
1	Mewujudkan Instansi Pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	Belum semua ASN memenuhi standar kompetensi jabatan	Pemetaan kompetensi pegawai sudah dilaksanakan
2	Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN	Pengelolaan ASN yang belum optimal	Penyusunan formasi ASN sesuai dengan standar kompetensi jabatan
3	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)	Sistem manajemen kepegawaian belum terintegrasi antara pusat/pemprov/kab/kota dengan baik	Adanya sistem informasi dan SDM aparatur yang handal
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima	Tata Kelola dan tata laksana manajemen ASN	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKD masuk kategori “BB”
5	Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN	Sistem pengendalian dan pengawasan yang masih konvensional dan lemahnya kesadaran aparatur dalam pelayanan publik	Adanya sistem dan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan NSPK , setiap instansi memiliki standar pelayanan
Visi Kementerian Dalam Negeri : “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa ”			
1	Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan	Lemahnya sosialisasi tentang pemantapan ideology dan wawasan kebangsaan	Adanya aturan yang jelas terhadap pemantapan ideology dan wawasan kebangsaan
2	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum	SDM Aparatur yang kurang kompeten	Pengembangan kompetensi Aparatur melalui diklat
3	Mewujudkan efektivitas	Terbenturnya kebijakan pusat terhadap keadaan di daerah	Adanya aturan yang jelas terhadap

No	Visi dan Misi Kementerian/Lembaga terkait	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(4)	(5)
	penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah	yang menyebabkan inkonsistensi terhadap aturan yang berlaku.	penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah
4	Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah	Adanya kebijakan dan regulasi yang dinilai kurang berkeadilan terhadap kebijakan yang ada	Konsistensi pimpinan terhadap kebijakan pembangunan kewilayahan
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif	Masih adanya kasus korupsi yang terjadi di berbagai instansi baik pusat maupun daerah	Adanya sistem akuntabilitas kinerja, pengembangan aparatur yang efektif, dan penegakan hukum yang baik.
Visi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) : " Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Berkelas Dunia"			
1	Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN	Kondisi Sistem Merit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih berada di kategori II "Kurang"	Adanya peraturan yang mengatur tentang penilaian mandiri pelaksanaan sistem merit dilingkungan instansi pemerintah

Selain hal tersebut diatas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan dikategorikan sebagai isu Kepegawaian pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, sebagai berikut :

1. Peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah belum sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. Optimalisasi SAPK yang kurang memadai antara lain Akses jaringan internet sering terganggu, data jabatan yang ada di daerah ada yang belum terdaftar di SAPK, Belum Terkoneksinya database yang ada di SAPK dan SIMPEG masing-masing daerah, dan belum tersedianya kuota KPE yang memadai;
3. Belum terintegrasinya sistem database kepegawaian antara BKD Prov. Kaltim dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kab/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan misi BKN RI "Satu Data ASN" dalam mendukung penyusunan kebijakan ASN berbasis data;
4. Belum disusunnya implementasi pengelolaan perpindahan ASN yang masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk mendapatkan ASN yang berkualitas, kompeten sesuai dengan standar yang

dibutuhkan.

5. Belum terimplementasinya pembinaan pola karir ASN dalam menggambarkan alur pengembangan karir ASN;
6. Adanya dualisme regulasi antara Peraturan KEMENPAN-RB dan Peraturan BKN;
7. Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM. BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 mendapatkan poin sebesar 205 atau berada pada kategori "II" (Kurang).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkait dengan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tentunya tidak bisa terlepas oleh adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). BKD Prov. Kaltim senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS yang diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan sekitar. Namun kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil kajian RTRW dan KLHS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilingkungan BKD Prov. Kaltim selama 5 Tahun kedepan, dapat dipastikan tidak akan bertentangan dengan aturan RTRW maupun KLHS. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

3.5. Penentu Isu-isu Strategis Kepegawaian

Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis terkait pengelolaan kepegawaian, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Isu-isu Strategis Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2018-2023

Isu-isu Strategis			
Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kewilayahan	Isu Lainnya
Penataan Manajemen SDM Aparatur	Penataan Manajemen SDM Aparatur	Pemekaran/ pembentukan daerah baru (proyek pemindahan ibukota negara baru)	Pengukuran kompetensi melalui sistem Computer Assessted Test (CAT)
Peningkatan Disiplin PNS	Peningkatan Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemprov Kaltim		Penyelenggaraan sistem absensi online/terintegrasi
Meningkatkan Pemahaman Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian	Peningkatan Kesehatan PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim		Penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan data kab/kota
Peningkatan Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Disiplin PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim		Proses mutasi kepegawaian menjadi <i>lesspaper</i>
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya Data Kepegawaian yang Cepat, Tepat, dan Akurat		Perkembangan era digitalisasi tatanan new normal menuju birokrasi berkelas dunia
Pengadaan CASN dan PPPK	Tersedianya Informasi Kepegawaian yang Terbuka, Cepat, dan Akurat		Penyelenggaraan SI ASN "Satu Data ASN" yang terintegrasi
	Menciptakan Pembinaan Administrasi Manajemen Kepegawaian yang Penuh Perhatian		Pengukuran sistem dan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan NSPK
	Meningkatkan Pengelola Kepegawaian yang Profesional		
	Meningkatkan Pemahaman Ketentuan Peraturan Perundang-		

Isu-isu Strategis			
Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kewilayahan	Isu Lainnya
	Undangan		
	Peningkatan Pendidikan Kedinasan		
	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
	Pengadaan PNSD sesuai dengan kebutuhan organisasi		

Berdasarkan gambaran isu-isu pengelolaan kepegawaian, maka secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut ;

Isu strategis yang dihadapi BKD		
Kalimat (-) "Masih...."	Kalimat (0)	Kalimat (+) "Perlunya...."
1. Lemahnya tatakelola/manajemen kepegawaian	1. Kualitas Tatakelola/manajemen kepegawaian	1. Peningkatan Tatakelola/manajemen kepegawaian
2. Belum tetapnya Standar pelayanan kepegawaian	2. Kualitas Standar pelayanan kepegawaian	2. Peningkatan Standar pelayanan kepegawaian
3. Kurangnya Akuntabilitas pengelolaan kepegawaian	3. Kualitas Akuntabilitas pengelolaan kepegawaian	3. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan kepegawaian
4. Lemahnya Pengawasan pengelolaan kepegawaian	4. Kapasitas Pengawasan pengelolaan kepegawaian	4. Peningkatan Pengawasan pengelolaan kepegawaian
5. Kurangnya Kualitas sumber daya aparatur	5. Kualitas sumber daya aparatur	5. Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur
6. Kurangnya Kinerja aparatur	6. Kualitas Kinerja aparatur	6. Peningkatan Kinerja aparatur
7. Lemahnya Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian	7. Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian	7. Peningkatan Kapasitas kelembagaan pengelola kepegawaian
8. Kurangnya Kebijakan dan sistem pengelolaan kepegawaian	8. Kapasitas Kebijakan dan sistem pengelolaan kepegawaian	8. Peningkatan Kebijakan dan sistem pengelolaan kepegawaian
9. Lemahnya Kapasitas manajemen internal BKD	9. Kapasitas manajemen internal BKD	9. Peningkatan Kapasitas manajemen internal BKD
10. Lemahnya Kapasitas sumber daya manusia BKD	10. Kapasitas sumber daya manusia BKD	10. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia BKD
11. Kurangnya Pengelolaan kepegawaian yang baik, bersih dan berwibawa.	11. Kapasitas Pengelolaan kepegawaian yang baik, bersih dan berwibawa.	11. Peningkatan Pengelolaan kepegawaian yang baik, bersih dan berwibawa.

Isu strategis yang dihadapi oleh perbidang tugas fungsi BKD adalah sebagai berikut:

1. Isu strategis Dalam Perumusan Kebijakan Kepegawaian Daerah
 - a. Standar pelayanan kepegawaian
2. Isu strategis Dalam Pemberian dukungan terhadap Kebijakan Kepegawaian Daerah
3. Isu Strategis bidang Mutasi ASN:
 - a. Perencanaan Mutasi Umum Pegawai yang tepat guna dan Konsisten dalam pelaksanaannya.
 - b. Adanya Digitalisasi Proses Mutasi Kepegawaian sehingga proses pelayanan kepegawaian dilakukan secara digital dan *lesspaper*
 - c. Kemampuan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan karir Pegawai dan Peningkatan kualitas pegawai didukung oleh aparatur yang handal dan sarana prasarana berdasarkan prinsip-prinsip good governance
 - d. Optimalisasi Pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan karir Pegawai dan Peningkatan kualitas pegawai
 - e. Penyempurnaan penerapan sistem merit yang berdasarkan 8 (delapan) aspek penilaian, dalam peningkatan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Isu Strategis bidang Pengembangan ASN :
 - a. Dapat menciptakan Tenaga Kepamongan yang profesional
 - b. Kemampuan mewujudkan Penataan dan Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional secara Profesional sesuai Kompetensi.
 - c. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta yang bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan (future leader) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (core business);
5. Isu Strategis bidang Pembinaan ASN Pegawai :
 - a. Penguatan kerjasama lembaga baik horizontal maupun vertikal.
 - b. Pemantapan sosialisasi, Workshop dan Bimtek guna meningkatkan mutu Pegawai secara Profesional sesuai dengan kompetensi.
 - c. Mampu mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan kepada PNS di lingkungan Pemprov. Kaltim.

- d. Kemampuan untuk meningkatkan Disiplin PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim.
- 6. Isu Strategis bidang Perencanaan, Pengadaan dan Informasi ASN :
 - a. Pemantapan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang akurat dalam menunjang pembangunan E-Personal Sistem Kepegawaian dan Tata Naskah Kepegawaian
 - b. Kajian pembangunan E-Personal Sistem Kepegawaian dan Pengelolaan Tata Naskah berbasis E-File Sistem untuk peningkatan mutu, kualitas dan akuntabilitas dalam perencanaan.
 - c. Kemampuan mewujudkan pengadaan ASN berdasarkan perbandingan obyektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan.
 - d. Kemampuan mewujudkan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK serta dapat mengundang talenta global
 - e. Kemampuan mewujudkan Satu Data ASN mendukung penyusunan kebijakan ASN berbasis data.
- 7. Isu Strategis Kesekretariatan BKD

Dalam menghadapi isu-isu strategis, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyusun pilihan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor – faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yaitu sebagai berikut :

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
1. Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2021 dan Pergub Kaltim No, 78 tahun 2019 2. Ketersediaan jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang cukup memadai ; 3. Fasilitas yang dimiliki ; 4. Kerjasama yang solid dengan <i>stakeholders</i> yang sudah semakin meningkat. 5. Tersedianya database kepegawaian (Simpeg bkd kaltim); 6. Tersedianya Sistem Absensi Online BKD; 7. Tersedianya UPTD Penilaian Kompetensi dalam rangka pengembangan kompetensi ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim ;	1. Distribusi sumber daya aparatur belum sesuai kompetensi pada masing-masing bidang ; 2. Belum terimplementasinya pembinaan pola karir ASN dalam menggambarkan alur pengembangan karir ASN ; 3. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia ; 4. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini ; 5. Peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai jangka menengah belum sesuai dengan analisis jabatan dan analisi beban kerja 6. Hasil penilaian sistem merit dilingkungan pemprov.kaltim masuk di kategori II “Kurang” 7. Belum terbangunnya integrasi sistem informasi database kepegawaian secara menyeluruh
Peluang (O)	Ancaman/Tantangan (T)
1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ; 2. Tersedianya inovasi teknologi yang memadai ; 3. Adanya kerjasama regional se Kalimantan Timur yang sudah terjalin untuk keterpaduan perencanaan pembangunan ke tingkat Nasional; 4. Tersedianya Peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi. 5. Sumber daya anggaran berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur; 6. Terbitnya PP 17 Tahun 2020 ttg manajemen PNS; 7. Terbitnya Permenpan 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta; 8. Penerimaan CPNS dan PPPK 2021 di pemprov.kaltim ; 9. Banyak PNS diluar pemprov kaltim / pns kab/kota dilingkungan pemprov kaltim masuk ke prov.kaltim ; 10. Permenpan RB Nomor 25 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi (berbasi kinerja & pemerintahan dinamis);	1. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran; 2. Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan ; 3. Adanya era disrupsi dan revolusi industri 4.0; 4. Penerapan sistem merit Kategori IV; 5. Penerapan Sistem Informasi ASN (Si-ASN) yang terintegrasi secara nasional 6. Penerapan Digitalisasi Mutasi Kepegawaian; 7. Pandemi Covid 19;

Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi, serta pengkajian strategis pembangunan dalam lima tahun ke depan (2019-2023) sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan fasilitas yang ada secara optimal dan meningkatkan sumber daya aparatur secara profesional dengan prinsip good governance (SO).

Strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 dan Pergub Kaltim No. 78 Tahun 2019 tentang SOTK BKD Prov.Kaltim ;
2. Memanfaatkan dan mengoptimalkan ketersediaan jumlah personil dan kapasitas kemampuan yang ada;
3. Cakupan tuposi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi ;
4. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki;
5. Melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang dikelola secara efektif dan efisien;
6. Penyelenggaraan pelayanan kepegawaian berbasis digitalisasi;
7. Penyelenggaraan peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja melalui Asessment Center;
8. Peningkatan penyempurnaan penerapan sistem merit;
- b. Mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang handal, operasional, fokus, berkelanjutan dan tuntas, partisipatif dan akuntabel (ST), dijabarkan sebagai berikut :
 1. Dokumen perencanaan dan kajian strategik pembangunan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan;
 2. Meningkatkan Keterpaduan/interaksi dengan Pemangku Kepentingan dan menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan sesuai dengan potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur;
 4. Meningkatkan sistem penganggaran secara efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis Teknologi;
 5. Pengembangan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi dengan pusat dan daerah;
 6. Pelaksanaan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi seluruh ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim untuk membangun manajemen talenta ASN;

- c. Meningkatkan sosialisasi produk-produk perencanaan dan kajian strategis pembangunan serta keterlibatan *stakeholders* dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (WO) :
 - 1. Memanfaatkan secara optimal hasil-hasil kajian strategis pembangunan dalam perencanaan pembangunan ;
 - 2. Mengisi jabatan fungsional Tenaga Perencanaan guna peningkatan kualitas dan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - 3. Mengoptimalkan pengelolaan data statistik dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini ;
 - 4. c
- d. Meningkatkan pengelolaan data statistik serta memperkuat koordinasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan (WT) :
 - 1. Melakukan konsolidasi dan penyesuaian mandat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan;
 - 2. Meningkatkan kuantitas basis statistik dan kajian pembangunan ;
 - 3. Menjaga konsistensi dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan;
 - 4. Meningkatkan kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN dilingkungan Pemprov.Kaltim

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Prov. Kaltim

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kalimantan Timur yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	Persentase jumlah SDM Aparatur dalam meningkatkan kualitas kinerja	0	0	91	92	93
			Persentase Kualitas Penataan Pegawai	92	93	94	95	96
			Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan:	75	75	80	82	85
			Persentase Capaian Kinerja PNS diatas 80%	0	50	60	75	85
		Pemenuhan Penataan dan kebutuhan Pegawai	Persentase PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan	20	20	18	15	10
2	Mewujudkan BKD Prov. Kaltim sebagai pusat informasi Kepegawaian dilingkup Pemprov. Kaltim	Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian	100	100	100	100	100
			Persentase Data Kepegawaian yang terupdate/ terbaru	100	100	100	100	100

Tabel 4.2
Sasaran Strategis (Perubahan) Jangka Menengah Pelayanan BKD Prov. Kaltim
(Ranhir Rensta Perubahan 2019-2023)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi yang berbasi kompetensi	1. Skor Sistem Merit	0	0	250	270	277
			2. Indeks Profesionalitas ASN	0	0	47		
		Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (Survey SKM)	0	0	80	91	92

Tabel 4.2
Sasaran Strategis (Perubahan) Jangka Menengah Pelayanan BKD Prov. Kaltim
(Ranhir Rensta Perubahan 2019-2023)
Sebelum

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi yang berbasis kompetensi	Skor Sistem Merit	0	0	250	270	277
		Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (Survey SKM)	0	0	80	91	92

Tabel 4.3
Sasaran Strategis (Perubahan) Jangka Menengah Pelayanan BKD Prov. Kaltim
(Rensta Perubahan 2019-2023)
Sesudah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indek Profesionalitas ASN	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi yang berbasis kompetensi	Skor Sistem Merit	0	0	250	270	277
			Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (Survey SKM)	0	0	80	91	92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Berikut kami kemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun mendatang untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT				
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
TUJUAN	SASARAN	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi yang berbasis kompetensi	Skor Sistem Merit	1. Penyelenggaraan Kebijakan Manajemen talenta; 2. Penyelenggaraan sistem pembinaan karir yang berkelanjutan; 3. Penyelenggaraan pengembangan PNS berdasarkan merit system yang didukung pola karier yang jelas; 4. Penyelenggaraan Peningkatan kualitas pelayanan mutasi kepegawaian	1. Pengembangan pendidikan dan pelatihan didasarkan prioritas kebutuhan organisasi dan hasil kebutuhan pelatihan (diklat pim, fungsional, dan teknis); 2. Peningkatan fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar; 3. Pelaksanaan pengukuran kompetensi dan mendokumentasikan hasil pengukuran kedalam sistem kepegawaian. 4. Melaksanakan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka dan objektif; 5. Penyusunan pergub pola karier. 6. Membuat rancangan pergub pengangkatan, pemberhentian dan pendelegasian dalam jabatan

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT				
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
TUJUAN	SASARAN	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			berdasarkan baku mutu dan jaminan pelayanan prima; 5. Penyelenggaraan peningkatan disiplin PNS dan kesejahteraan PNS berdasar kinerja yang didukung reward & punishment;	fungsional; 7. Pendataan pemangku jabatan fungsional; 8. Sinkronisasi data pemangku jabatan dan formasi. 9. Menyusun pergub manajemen kinerja; 10. Pembentukan tim penilaian kinerja; 11. Menyiapkan aplikasi pendukung e-kinerja; 12. Sosialisasi Peraturan Gubernur Kinerja. 13. Sosialisasi peraturan kepegawaian serta penerapan kode etik pegawai; 14. Melaksanakan mediasi penyelesaian kasus pelanggaran disiplin; 15. Pemeriksaan pelanggaran disiplin; 16. Penetapan Keputusan Hukuman Disiplin.

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT				
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
TUJUAN	SASARAN	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				17. Rekrutmen ASN; 18. Pendistribusian Pegawai; 19. Pengadaan pegawai melalui jalur khusus (IPDN); 20. Menetapkan E-formasi. 21. Penyusunan Pergub Mutasi/Perpindahan PNS; 22. Pembentukan Tim Pertimbangan Mutasi/Perpindahan; 23. Melaksanakan tes uji kompetensi, psikologi/MMPI (kejiwaan), tes kesehatan bagi aparatur yang ingin pindah ke pemprov. Kaltim. 24. Pembentukan Tim Pertimbangan Kenaikan Pangkat PNS; 25. Penyusunan Pergub Kenaikan Pangkat PNS; 26. Melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT				
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
TUJUAN	SASARAN	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Ijazah. 27. Melaksanakan Uji Kompetensi bagi PNS Pemprov.Kaltim.
	Mewujudkan Pelayanan Prima di bidang Kepegawaian	Meningkatkan Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (Standar Kepuasan Masyarakat)	1. Peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) ke level prima; 2. Pemanfaatan <i>Information and Communication Technologies</i> (ICT) dalam pelayanan ; 3. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian melalui	1. Penguatan penerapan <i>e- service</i> dan pemenuhan standar pelayanan; 2. Peningkatan kualitas kinerja dan pengawasan dalam pelayanan yang ramah, cepat, efektif, dan efisien; 3. Peremajaan Data yang terprogram setiap bulan; 4. Optimalisasi Jaringan serta kerjasama dengan instansi pendukung terkait penyediaan server database; 5. Sinkronisasi database kepegawaian melalui pengembangan aplikasi. 6. Updating file mandiri pegawai; 7. Kompilasi Dokumen Kepegawaian.

VISI : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT				
MISI : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
TUJUAN	SASARAN	Indikator	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penguatan data base pegawai yang up to date; 4. Pembangunan Satu Data ASN untuk mendukung penyusunan kebijakan ASN berbasis data.	8. Sistem informasi kepegawaian prov kaltim yang berbasis online yang terintegrasi dengan data SAPK dan data kepegawaian kab/kota;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2021)		Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp (Juta)		
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		84	2.075	BKD	
			1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran		12	2.075		Samarinda
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		5	1.200		
			1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor		35	600		Samarinda
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		12	600		Samarinda
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi		10%	1.340		
			1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		92	900		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah		50			
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan/pelatihan/tamu		12			
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dilindungi BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional		14	440		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah pengadaan pakaian dinas		280			
				Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian		2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2021)		Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp (Juta)		
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		75	350		
			1. Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran		9	50		Samarinda
			2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan laporan pengendalian evaluasi pelaksanaan kegiatan		4	300		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kalimantan Timur yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi				Persentase jumlah SDM Aparatur dalam meningkatkan kualitas kinerja		89			
				Persentase kualitas Penataan Pegawai		92			
	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur			Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;		75			
				Persentase Capaian Kinerja PNS diatas 80%		0			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan struktural		97			
			1. Pengembangan Karier Pegawai	Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas sesuai dengan formasi		95	500		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
			2. Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Jumlah Pegawai yang terpetakan dan terukur kemampuannya		300	500		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
			3. Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang diangkat, dibebaskan atau diberhentikan dari jabatan fungsional		100	250		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
			4. Evaluasi Kinerja PNS	Persentase tingkat kehadiran PNS		98%	100		Samarinda
			5. Penilaian Prestasi Kerja PNS	Persentase PNS yang memiliki Nilai diatas cukup		99%	800		Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1 (2021)		Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp (Juta)		
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6. UjianDinas	Jumlah PNS yang melaksanakan ujian dinas		200	98		Samarinda
			7. Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajardan Ijin Belajar		75	7.500		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			8. Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah Laporan penyusunan formasi pegawai		1	1.800		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			9. Penempatan PNS	Jumlah SK yang terbit terhadap usulan mutasi		295	270		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			10. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu		3.081	200		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			11. Pemberian Penghargaan bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima penghargaan yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun		1.000	700		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			12. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Eselon I		50	250		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
			13. Rapat Kerja Kepegawaian	Jumlah kegiatan rapat koordinasi kepegawaian		1	1.000		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Luar Wilayah Kaltim
			14. Pemberhentian PNS	Jumlah PNS yang pensiun		300	150		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			15. Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang diusulkan melaksanakan Diklat Struktural, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya		200	900		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
Mewujudkan BKD Prov. Kaltim sebagai pusat informasi Kepegawaian dilingkup Pemprov. Kaltim	Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian			Persentase data kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian		100			
				Persentase Data Kepegawaian yang terupdate/terbarukan		100			
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan		100	462		
			1. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah data PNS yang terupdate dalam e-personal sistem		5.500	267		Samarinda,, Luar Wilayah Kaltim
			2. Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah Data PNS yang di update		3.000	300		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 - 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)				85	2.075	86	2.075							Sekretariat	Samarinda
			1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran				12	2.075	12	2.075								
				Jumlah laporan keuangan semester dan akhir tahun yang terselesaikan				2		2									
				Jumlah GU/LS/TUP yang diselesaikan				200		200									
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu				5	1.200	5	1.200							Sekretariat	Samarinda
			1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah pengadaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana kantor				38	600	40	600								
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana				12	600	12	600							
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi				11	1.903	12	2.208							Sekretariat	

Renstra Perubahan 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)								
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				55	903	60	1.000									Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim		
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah				80		80												
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan/pelatihan /tamu				12		12												
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS dilingkungan BKD yang mengikuti Bimtek/Diklat Teknis/Fungsional				17	100	20	290											Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah pengadaan pakaian dinas				0		280												
			3. Sinkronisasi dan Pemantapan ASN	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian				1	900	1	918											Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian				2		2												
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD							76	350	77	375							Sekretariat	
			1. Penyusunan Dokumen dan Perencanaan	Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra							2	50	2	50								

Renstra Perubahan 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)							
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Kalimantan Timur yang Kompeten, Berdaya Saing, Profesional dan berintegritas tinggi	Meningkatnya Kualitas Kinerja SDM Aparatur	4.05.16	Anggaran	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan				2		2								Bidang Pengembangan	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim		
				Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja				21		21											
				Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan				2		2											
				Jumlah DPA dan DPA Perubahan				2		2											
			2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim				BB	300	BB	325										
				Jumlah Dokumen LPPD				1		1											
				Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan				12		12											
				Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja				4		4											
				Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja				19		19											
				Persentase Jumlah SDM Aparatur dalam meningkatkan kualitas kinerja		89		90		91											
				Persentase kualitas Penataan Pegawai		92		93		94											
				Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;		70		75		80											
				Persentase Capaian Kinerja PNS diatas 80%		0		50		60											
		4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan		80	10.065	75	9.225	80	9.375										
		4.05.16.01	1. Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama				15	225	20	250										

Renstra Perubahan 2019 - 2023

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)							
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain				1		1										Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim	
				Jumlah Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing				4		25											
				Jumlah Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi				80		90											
				Jumlah Pemberhentian dari jabatan fungsional				8		16											
				Jumlah Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional				12		18											
		4.05.16.02	2. Peningkatan Kualitas Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran kompetensi pegawai				325	8.400	350	8.500						33.800		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim		
				Jumlah PNS yang melaksanakan Tugas Belajar				50	55												
				Jumlah PNS yang melaksanakan Ijin Belajar				30	30												
				Jumlah PNS yang diusulkan melaksanakan Diklat Struktural, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya				200	210												
		4.05.16.03	3. Pengembangan Karier Pegawai	Persentase PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas				88,5	600	89,61	625						2.350		Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim		
				Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi				11	5												
				Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan				40	27												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)							
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Administrator																	
				Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan Pengawas				66		53											
				Jumlah PNS yang direkomendasi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kab/Kota				2		1						8					
				Jumlah PNS Kab/Kota yang direkomendasi untuk menduduki Jabatan Struktural yang menangani Administrasi Kependudukan				13		13						61					
		4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS berkinerja baik		80	6.334	82	3.250	84	2.700					88	11.350	Bidang Pembinaan			
		4.05.17.01	1. Penegakan Kode Etik, Perilaku dan Disiplin Pegawai	Jumlah Penanganan Kasus yang ditangani			52	500	55	500					223	2.000					
				Jumlah Cuti PNS			310		320				1300								
				Jumlah PNS yang diberhentikan/pensiun			330		340			1.380									
				Persentase Tingkat Kehadiran PNS			98		98			99									
		4.05.17.02	2. Penilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80%			82	2.750	84	2.200					88	9.350				Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim	
				Jumlah PNS yang mendapatkan KGB			1500		1500			6.000									
				Jumlah PNS yang menerima SLKS			1000		1000			4.000									
				Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti Seminar dan Konseling			433		444			1.755									
				Jumlah PNS yang melaksanakan tes kesehatan			6325		150			6.850									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)							
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Pemenuhan Penataan dan Kebutuhan Pegawai				Persentase PNS yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan		20		20		18						10					
		4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang dimutasi sesuai dengan job description		87	2.508	89	2.220	91	2.275								Bidang Mutasi	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim	
		4.05.15.01	1. Administrasi Kependudukan PNS	Jumlah Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)				1144	200	1146	200										
				Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/b kebawah				715		745											
				Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS Provinsi Gol. IV/c keatas				18		22											
				Jumlah Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/kota Gol.IV/b kebawah				880		836											
				Jumlah Kenaikan Pangkat bagi PNS kab/kota Gol.IV/c keatas				70		62											
		4.05.15.02	2. Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah PNS yang Melaksanakan Ujian Dinas				0	1.750	200	1.800										
				Jumlah PNS yang melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah				30		30											
				Jumlah dokumen dalam rangka seleksi CPNS				1		1											
				Jumlah CPNS menjadi PNS				286		200											
				Jumlah PNS yang melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji PNS				286		200											
				Jumlah pengadaan CPNS dari sekolah kedinasan (IPDN)				3		3											

Renstra Perubahan 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)					
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.05.15.03	3. Penempatan PNS	Jumlah PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur				60	270	55	275								Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim
				Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim				50		50									
				Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim				60		60									
				Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim				20		20									
				Jumlah PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim				30		25									
				Jumlah PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur				50		50									
Mewujudkan BKD Prov. Kaltim sebagai pusat informasi Kepegawaian				Persentase data kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian		95		96		96									
	Meningkatnya Kualitas Informasi			Persentase Data Kepegawaian yang terupdate/terbarukan		100		100		100									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)							
								Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Targe t	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
dilingkup Pemprov. Kaltim	Kepegawaian	4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan		100	462	100	585	100	600							Bidang Dokinfo	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Mahulu, Berau, Luar Wilayah Kaltim		
		4.05.18.01	1. Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai	Jumlah Update Data Kepegawaian melalui SIMPEG				5500	300	5500	300										
				Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian				6		6											
		4.05.18.02	2. Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Jumlah karis/karsu yang diproses				360	285	360	300										
				Jumlah Karpeg yang diproses				300		500											
				Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian				1200		1200											
				Jumlah Dokumen Kepegawaian yang ter update				3000		3000											

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 – 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2	3	4			5	6	9	10	
	KEPEGAWAIAN									
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100		100				
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu		59	390	59	310			Sekretariat
5.03.01.1.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen DPA 2. Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan 3. Jumlah Dokumen Renstra dan Reviu Renstra 4. Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan 5. Jumlah Dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja	Provinsi Kalimantan Timur	2 2 1 2 26	50 	2 2 1 2 26	40			Subbag Perencanaan dan Program
5.03.01.1.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen LPPD 2. Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja 3. Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 4. Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bulanan 5. Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Renja 6. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Prov. Kaltim	Provinsi Kalimantan Timur	1 25 4 12 2 78	340 	1 25 4 12 2 79	270			Subbag Perencanaan dan Program

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2		3		4			5	6	9	10	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu			1	14.567	1	16.086			Sekretariat
5.03.01.1.02.01	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan PNS serta Gaji Non PNS		Provinsi Kalimantan Timur	12	14.567	12	16.086			Subbag Keuangan
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur			100	362	100	440			Sekretariat
5.03.01.1.05.02	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas		Provinsi Kalimantan Timur	326	318	394	384			Subbag Umum
5.03.01.1.05.09	2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan			12	44	15	56			
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana			100	1.701	100	1.526			Sekretariat
	1.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang yang dicetak		Provinsi Kalimantan Timur	0	0	500	35			Subbag Umum
			Jumlah Barang yang digandakan			0	0	20				
5.03.01.1.06.02	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor		Provinsi Kalimantan Timur	42	359	30	291			
5.03.01.1.06.09	3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	Provinsi Kalimantan Timur	12	1.342	12	1.200			
			2.	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		35		37				
			3.	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		20		25				
			4.	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Kepegawaian		2		2				
			5.	Jumlah Sosialisasi Peraturan Kepegawaian		2		2				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2		3	4			5	6	9	10	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi yang diselesaikan tepat waktu		2	3.022	2	2.752			Sekretariat
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terdistribusi	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	9.000	27			Subbag Umum
			Jumlah Pengadaan Materai		0	0	600				
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0	0	12	834			
5.03.01.1.08.04	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.	Provinsi Kalimantan Timur	12	3.022	12	1.891			
			2.		Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun yang terselesaikan		2			2	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase barang layak pakai		88	3.884	89	2.001			Sekretariat
5.03.01.1.09.02	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Provinsi Kalimantan Timur	23	41	23	188			Subbag Umum
5.03.01.1.09.10	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Provinsi Kalimantan Timur	12	3.843	12	1.813			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Presentase Pemenuhan Kebutuhan ASN		85	3.344	90	2.800			Bidang PPI ASN
5.03.02.1.01.02	1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.	Provinsi Kalimantan Timur	1	1.000	1	700			Subbid Perencanaan dan Pengadaan ASN
			2.		Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan sumpah janji ASN		1	1			

Renstra Perubahan 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2		3		4			5	6	9	10	
			3.	Jumlah laporan kegiatan Ujian Dinas yang dilaksanakan		1		1				
			4.	Jumlah laporan kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah yang dilaksanakan		1		1				
			5.	Persentase usulan kartu TASPEN, KARPEG dan Karis/Karsu yang terselesaikan		90		90				
5.03.02.1.01.06	2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.	Persentase usulan pemberhentian ASN yang terselesaikan	Provinsi Kalimantan Timur	100	353	100	400			Subbid Pemberhentian ASN
			2.	Persentase usulan pensiun ASN yang terselesaikan		100		100				
5.03.02.1.01.08	3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.	Jumlah fasilitasi kegiatan seni dan budaya	Provinsi Kalimantan Timur	3	1.383	3	1.200			Subbid Organisasi Profesi ASN
			2.	Jumlah Kegiatan MTQ		1		1				
			3.	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan keolahragaan		1		1				
			4.	Jumlah pendampingan bantuan hukum		1		1				
5.03.02.1.01.11	4.	Pengelolaan Data Kepegawaian	1.	Persentase pemutakhiran data kepegawaian	Provinsi Kalimantan Timur	100	607	100	500			Subbid Sistem Informasi dan Pengolahan Data ASN
			2.	Jumlah berita kepegawaian yang terupdate		60		60				
			3.	Jumlah brosur layanan kepegawaian		38		38				
			4.	Jumlah buku profil dan buku saku kepegawaian yang terselesaikan		50		60				
			5.	Jumlah pengembangan sistem aplikasi kepegawaian		3		3				
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN			Presentase Penempatan PNS sesuai dengan kebutuhan		82	1.648	85	1.300			Bidang Mutasi ASN
5.03.02.1.02.01	1.	Pengelolaan Mutasi ASN	1.	Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Prov. Kaltim ke	Provinsi Kalimantan Timur	75	489	80	400			Subbid Mutasi

Renstra Perubahan 2019 - 2023

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2		3	4	5	6	5	6	9	10	
			Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan								
			2. Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Prov. Kaltim yang terselesaikan		80		80				
			3. Persentase usulan PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan		79		80				
			4. Persentase usulan PNS yang pindah antar unit kerja/perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan		76		78				
			5. Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi Kaltim keluar Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan		77		80				
			6. Persentase usulan PNS yang pindah dari Pemerintah Kab/Kota/Provinsi/Kementerian diluar Prov. Kaltim ke Pemerintah Kab/Kota didalam Wilayah Prov. Kaltim yang terselesaikan		78		80				
5.03.02.1.02.02	2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1. Jumlah SK Kenaikan Pangkat (Reguler) yang diterbitkan	Provinsi Kalimantan Timur	850	533	1.000	400			Subbid Kepangkatan
			2. Persentase Usulan Kenaikan Pangkat bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/c keatas ya		90		90				
			3. Persentase Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Kab/Kota Gol. IV/b kebawah yang terselesaikan		95		95				
			4. Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/b kebawah yang		85		88				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2		3	4			5	6	9	10	
			terselesaikan								
			5. Persentase usulan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Provinsi Gol. IV/c keatas yang terselesaikan		70		80				
5.03.02.1.02.03	3.	Pengelolaan Promosi ASN	1. Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)	Provinsi Kalimantan Timur	100	625	100	500			Subbid Mutasi Jabatan
			2. Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		75		85				
			3. Persentase ASN yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III)		80		85				
			4. Persentase ASN yang menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV)		85		90				
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah dikembangkan kompetensinya		80	5.342		5.354			Bidang Pengembangan ASN
5.03.02.1.03.03	1.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1. Persentase Jabatan Fungsional yang tersertifikasi	Provinsi Kalimantan Timur	10	236	65	240			Subbid Sertifikasi Jabatan ASN
			2. Persentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang tersertifikasi		20		85				
			3. Persentase Jabatan Pelaksana yang tersertifikasi		10		55				
5.03.02.1.03.04	2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1. Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Fungsional	Provinsi Kalimantan Timur	35	4.733	40	4.733			Subbid Peningkatan Kualitas ASN
			2. Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Prajabatan		200		200				
			3. Persentase Jabatan Pelaksana yang tersertifikasi		50		130				
			4. Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Teknis		150		200				
			5. Persentase usulan PNS Ijin Belajar yang diproses		85		90				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2		3		4	5		6		9	10	
			6.	Persentase usulan PNS Tugas Belajar yang diproses		80		85				
5.03.02.1.03.14	3.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1.	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama yang terselesaikan	Provinsi Kalimantan Timur	70	373	75	380			Subbid Pembinaan Jabatan Fungsional
			2.	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang terselesaikan		71		75				
			3.	Persentase usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing yang terselesaikan		72		0				
			4.	Persentase usulan Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi yang terselesaikan		73		75				
			5.	Persentase usulan Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional yang terselesaikan		74		75				
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Presentase ASN yang berkinerja baik	85	98	8.953	90	1.100			Bidang Pembinaan ASN
5.03.02.1.04.02	1.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.	Persentase PNS yang mencapai target kinerja diatas 80%	Provinsi Kalimantan Timur	70	8.585	75	700			Subbid Penilaian, Evaluasi, Kinerja dan Penghargaan ASN
			2.	Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti seminar dan konseling		30		40				
			3.	Jumlah PNS yang mendapatkan KGB		2000		2.000				
			4.	Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan terhadap capaian kinerja		125		125				
			5.	Jumlah PNS yang menerima SLKS		750		750				
5.03.02.1.04.07	2.	Pembinaan Disiplin ASN	1.	Persentase Tingkat Kehadiran PNS	Provinsi Kalimantan Timur	98	349	98	400			Subbid Kedudukan Hukum
			2.	Persentase Penanganan Kasus yang terselesaikan		85		85				

Renstra Perubahan 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2		3		4	5	6	5	6	9	10	
			3.	Persentase usulan Cuti PNS yang diproses		100		100				
			4.	Persentase usulan perceraian pegawai yang terselesaikan		98		98				

UPTD Penilaian Kompetensi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2		3	4			5	6	9	10	
	KEPEGAWAIAN										
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Provinsi Kalimantan Timur			100	180			Subbag TU
5.03.01.1.05.02	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	Provinsi Kalimantan Timur			20	46			
5.03.01.1.05.09	2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan	Provinsi Kalimantan Timur			20	134			
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Provinsi Kalimantan Timur			100	795			
	1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang yang dicetak	Provinsi Kalimantan Timur			500	37			
			Jumlah barang yang digandakan				30				
5.03.01.1.06.02	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor	Provinsi Kalimantan Timur			80	534			Subbag TU
5.03.01.1.06.09	3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)	Provinsi Kalimantan Timur			12	457			Subbag TU
			2. Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah								
			3. Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah								

Renstra Perubahan 2019 - 2023
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021		Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	
1	2		3	4			5	6	9	10	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Provinsi Kalimantan Timur			1	837			
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terdistribusi	Provinsi Kalimantan Timur			1.000	17			Subbag TU
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Timur			12	270			Subbag TU
5.03.01.1.08.04	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran				12	550			Subbag TU
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Provinsi Kalimantan Timur				545			
5.03.01.1.09.02	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Provinsi Kalimantan Timur			12	45			Subbag TU
5.03.01.1.09.10	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Provinsi Kalimantan Timur			12	500			Subbag TU
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN			Provinsi Kalimantan Timur							
1.03.02	Pengelolaan Aassessment Center		1. Jumlah Laporan Pemetaan Kompetensi	Provinsi Kalimantan Timur			1	700			Seksi Penilaian dan Pengujian
			2. Jumlah PNS yang mengikuti pengukuran dan penilaian kompetensi pegawai				200				
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Aassessment Center		1. Jumlah Laporan Pengembangan Instrumen	Provinsi Kalimantan Timur			1				Seksi Pengembangan Instrumen
			2. Jumlah Instrumen yang dikembangkan untuk mengukur PNS				3				

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023
(Setelah Evaluasi)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Sumber Dana
1	2		3	4	5	6	7
	KEPEGAWAIAN						
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100		APBD
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					340	APBD
5.03.01.1.01.01	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Timur	3	60	APBD
5.03.01.1.01.06	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	5	280	APBD
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.600	APBD
5.03.01.1.02.01	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Timur	85	14.600	APBD
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						APBD
5.03.01.1.05.02	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Kalimantan Timur	1	170	APBD
5.03.01.1.05.09	2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		17	32	APBD
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						APBD
	1.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	5	29	APBD
5.03.01.1.06.02	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	15	1.750	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Sumber Dana
1	2		3	4	5	6	7
5.03.01.1.06.09	3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Timur	2	1.200	APBD
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						APBD
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Timur	1	21	APBD
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	3	568	APBD
5.03.01.1.08.04	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Kalimantan Timur	1	2.005	APBD
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						APBD
5.03.01.1.09.02	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny	Provinsi Kalimantan Timur	10	34	APBD
5.03.01.1.09.10	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	2	1.239	APBD
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						APBD
5.03.02.1.01.02	1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Provinsi Kalimantan Timur	1	900	APBD
5.03.02.1.01.06	2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Provinsi Kalimantan Timur	1	320	APBD
5.03.02.1.01.08	3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Provinsi Kalimantan Timur	1	900	APBD
5.03.02.1.01.11	4.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Provinsi Kalimantan Timur	1	528	APBD
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN						APBD
5.03.02.1.02.01	1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi.	Provinsi Kalimantan Timur	1	420	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Juta)	Sumber Dana
1	2		3	4	5	6	7
5.03.02.1.02.02	2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Provinsi Kalimantan Timur	2	350	APBD
5.03.02.1.02.03	3.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Provinsi Kalimantan Timur	1	600	APBD
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						APBD
5.03.02.1.03.03	1.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Provinsi Kalimantan Timur	1	300	APBD
5.03.02.1.03.04	2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN	Provinsi Kalimantan Timur	1	5.800	APBD
5.03.02.1.03.14	3.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Provinsi Kalimantan Timur	1	450	APBD
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						APBD
5.03.02.1.04.02	1.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Provinsi Kalimantan Timur	1	1.300	APBD
5.03.02.1.04.07	2.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Provinsi Kalimantan Timur	1	375	APBD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan		75	75	80	82	85	
2	Persentase Capaian Kinerja PNS diatas 80%		0	50	60	75	85	

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Ranhir Perubahan)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Skor Sistem Merit		0	0	250	270	277	
2	Indeks Profesionalitas ASN		0	0	47			
3	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)		0	0	80	91	92	

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Perubahan)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Skor Sistem Merit		0	0	250	270	277	
2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat daerah (SKM)		0	0	80	91	92	

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019-2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023.

Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen selama 5 (lima) tahun ke depan; memberikan arah, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dokumen RPJMD Perubahan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan rencana tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode lima tahun, 2019-2023 yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
Drs. Diddy Rusdiansyah Anan Dani, MM

"BERANI UNTUK KALTIM BERDAULAT"